

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Negara Indonesia ialah negara yang terletak di daerah Asia yang diapit oleh 2 Samudra yaitu Samudra Hindia serta Samudra Pasifik. Indonesia ialah negara berkembang yang seringkali dikenal dengan Negara kepulauan. Negara Indonesia terdiri dari 38 provinsi dengan 416 kabupaten serta 98 kota. Wilayah Indonesia yang sangat luas ini memberikan dampak pada optimalisasi pembangunan yang tidak mudah. Terpisahnya daerah Indonesia mengakibatkan laju pertumbuhan ekonomi disetiap daerah tidak sama. Adapun pulau yang ada di Indonesia yang tingkat perekonominya tergolong stabil yaitu Pulau Jawa.

Banyaknya daerah dan kota di Indonesia, maka untuk mempermudah proses pembangunan dan kemandirian daerah, kini dialihkan dari sistem sentralisasi menuju sistem desentralisasi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah Nomor 22 Tahun 1999. Dalam sistem desentralisasi, sebagian kewenangan pusat dilimpahkan kepada Pemerintah Provinsi, yang diwujudkan dalam bentuk otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

dalam bentuk pengaturan daerah, termasuk pelaksanaan pembangunan daerah.<sup>2</sup>

Setiap daerah mempunyai kemampuan pengelolaan keuangan yang berbeda-beda dalam membiayai kegiatannya sehingga menimbulkan disparitas fiskal antar daerah. Oleh karena itu, pemerintah mengalokasikan dana untuk menghilangkan ketidakseimbangan keuangan publik yang bersumber dari APBD untuk membiayai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan kegiatan. APBD merupakan sarana yang digunakan untuk menampung berbagai kepentingan publik yang diwujudkan melalui berbagai kegiatan dan program. APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat daerah.<sup>3</sup> Dalam Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 dijelaskan bahwa pendapatan daerah dan dana perimbangan yang diterima daerah dari negara merupakan sumber pendanaan pembangunan daerah.

Keuangan daerah dan desentralisasi fiskal merupakan dua hal yang saling berkaitan, terutama bila dikaji dalam konteks otonomi daerah. Keuangan daerah dalam arti sempit yakni terbatas pada hal-hal yang berkaitan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Berbeda dengan desentralisasi fiskal dalam kaitan dengan otonomi daerah. Desentralisasi fiskal lebih banyak bersinggungan dengan kebijakan fiskal

---

<sup>2</sup> Berti Indah Sari, 'Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dan Alokasi Umum Dan Belanja Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Barat', *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 3.1 (2021), hal 1–11.

<sup>3</sup> Moh. Khusaini, *Keuangan Daerah*, ed. by Tim UB Press, 1st edn (Malang: Tim UB Press, 2018).

nasional dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Desentralisasi fiskal tidak terlepas dari konteks APBN, sebagai instrumen kebijakan ekonomi makro nasional. Namun demikian, kebijakan desentralisasi fiskal juga berpengaruh langsung terhadap kondisi keuangan daerah, khususnya APBD. Hal ini dikarenakan kebijakan alokasi atau transfer dana pusat kepada daerah, apapun sistem, bentuk dan jenisnya, adalah dalam kerangka pelaksanaan tugas dan wewenang pemerintahan yang sudah diserahkan kepada daerah melalui otonomi daerah atau desentralisasi.<sup>4</sup>

Peranan pemerintah daerah dalam mewujudkan hasil keuangan pemerintah daerah sangatlah penting, karena efisiensi pemerintah mencerminkan keberhasilan pemerintah daerah dalam mengelola perekonomian daerah sehingga daerah menghasilkan kesejahteraan bagi masyarakat.

Kinerja keuangan yang baik menunjukkan bahwa pemerintah melakukan pengelolaan anggaran dengan transparan dan akuntabel. Hal ini penting, karena untuk membangun kepercayaan publik dan memastikan bahwa dana publik digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

---

<sup>4</sup> Suwardi, *Desentralisasi Fiskal Dan Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Penyerapan Tenaga Kerja, Kemiskinan, Dan Kesejahteraan Di Kabupaten/Kota Induk Provinsi Papua*, ed. by Unggul Pebri Hastato dan Dyah Wuri Handayani, 1st edn (yogyakarta: DEEPUBLISH, 2015).

**Tabel 1.1****Tingkat Rasio Pendapatan Asli Daerah Provinsi Di Indonesia**

No	Nama Provinsi	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Nanggroe Aceh Darussalam	17%	18%	18%	21%	28%
2	Sumatera Utara	44%	43%	46%	58%	57%
3	Sumatera Barat	36%	35%	38%	47%	47%
4	Riau	41%	39%	43%	53%	59%
5	Jambi	36%	35%	39%	46%	44%
6	Sumatera Selatan	38%	36%	40%	49%	53%
7	Bengkulu	28%	26%	32%	37%	35%
8	Lampung	42%	40%	44%	54%	54%
9	DKI Jakarta	73%	67%	63%	68%	74%
10	Jawa Barat	59%	54%	55%	70%	80%
11	Jawa Tengah	56%	54%	55%	67%	67%
12	Daerah Istimewa Yogyakarta	37%	33%	33%	41%	41%
13	Jawa Timur	58%	57%	55%	67%	66%
14	Kalimantan Barat	39%	38%	39%	53%	51%
15	Kalimantan Tengah	36%	33%	36%	46%	40%
16	Kalimantan Selatan	52%	45%	54%	56%	48%
17	Kalimantan Timur	56%	52%	60%	54%	59%
18	Sulawesi Utara	33%	30%	33%	39%	41%
19	Sulawesi Tengah	26%	27%	32%	32%	38%
20	Sulawesi Selatan	43%	42%	45%	54%	55%
21	Sulawesi Tenggara	27%	25%	30%	32%	33%
22	Bali	61%	54%	53%	66%	68%
23	Nusa Tenggara Barat	35%	35%	35%	43%	48%
24	Nusa Tenggara Timur	24%	22%	23%	31%	31%
25	Maluku	16%	18%	18%	22%	22%
26	Papua	13%	11%	15%	20%	40%
27	Maluku Utara	16%	17%	19%	25%	20%
28	Banten	63%	57%	60%	73%	74%
29	Bangka Belitung	31%	28%	33%	38%	37%
30	Gorontalo	22%	22%	26%	28%	27%
31	Kepulauan Riau	33%	34%	36%	43%	43%
32	Papua Barat	4%	6%	7%	8%	11%
33	Sulawesi Barat	17%	17%	20%	24%	23%
34	Kalimantan Utara	25%	23%	26%	30%	32%
35	Papua Tengah					

36	Papua Pegunungan					
37	Papua Selatan					
38	Papua Tengah					

Sumber: *DJPK data diolah, 2024*

Pada tabel tingkat rasio pendapatan asli daerah Provinsi di Indonesia menunjukkan Provinsi Jawa Timur mempunyai pendapatan asli daerah sangat efektif. Karena Provinsi Jawa Timur memiliki tingkat rasio dari tahun 2019-2023 diatas 50%. Dibandingkan dengan Provinsi yang lain, Provinsi Jawa Timur termasuk mempunyai tingkat perekonomian yang stabil, meskipun masih ada Provinsi lain yang tingkat rasio pendapatan asli daerah lebih baik seperti: DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Timur, Bali, dan Banten.<sup>5</sup>

Jawa Timur merupakan provinsi dengan kabupaten/kota terbanyak, yakni 29 wilayah Kabupaten dan 9 kota. Meski memiliki wilayah yang luas di Pulau Jawa, bukan berarti kondisi perekonomian bisa stabil setiap tahunnya. Kenyataannya, Provinsi Jawa Timur masih bergantung pada bantuan Pemerintah dalam bentuk dana APBN untuk lebih meningkatkan perekonomian Provinsi Jawa Timur.

Berikut pemaparan realisasi pendapatan asli daerah Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2023.

---

<sup>5</sup> Gede Edy Prasetya, *Penyusunan Dan Analisis Laporan Keuangan Daerah*, 1st edn (Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2005). Hal 51-53

Tabel 1.2

## Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2023



Sumber: *Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur*

Pada tabel pendapatan asli daerah Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2023 menunjukkan bahwa Provinsi Jawa Timur dengan 29 Kabupaten dan 9 Kota pada tahun 2019 mempunyai pendapatan asli daerah sejumlah 19.327,12 Milyar Rupiah, pada tahun 2020 mempunyai pendapatan asli daerah sejumlah 17.950,99 Milyar Rupiah, pada tahun 2021 mempunyai pendapatan asli daerah sejumlah 18.935,88 Milyar Rupiah, dan pada tahun 2022 mempunyai pendapatan asli daerah sejumlah 21.256,65 Milyar Rupiah, pada tahun 2023 mempunyai pendapatan asli daerah sejumlah 22.317,20 Milyar Rupiah. Realisasi pendapatan asli daerah Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2023 mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Namun pada tahun 2020 juga terjadi penurunan akibat wabah pandemi yang menyebabkan berkurangnya mobilitas.

Pemerintah pusat mengembangkan kebijakan otonomi daerah dengan tujuan agar Pemerintah daerah lebih mandiri dalam penyelenggaraan perekonomian daerah, hal ini berkaitan dengan evaluasi hasil perekonomian negara. Dengan membandingkan rencana kerja dan pelaksanaannya, pengukuran kinerja keuangan untuk kepentingan publik dapat digunakan sebagai evaluasi dan pemulihan kinerja.<sup>6</sup>

Dana alokasi umum adalah dana yang diberikan untuk mencapai pemerataan keuangan antar daerah dan digunakan untuk membiayai pengeluaran yang dilakukan secara desentralisasi. Dana alokasi umum merupakan dana yang berasal dari pendapatan APBN yang dialokasikan untuk mendanai kebutuhan daerah. Dalam hal ini Pemerintah Daerah secara leluasa dapat menggunakan dana alokasi umum untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat sehingga akan menciptakan hidup yang lebih bersih dan harapan hidup lebih panjang, serta meningkatkan kualitas pendidikan yang sesuai dengan standar yang layak.

**Tabel 1.3**

**Tingkat Rasio Dana Alokasi Umum Provinsi Di Indonesia**

No	Nama Provinsi	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Nanggroe Aceh Darussalam	15%	14%	14%	14%	19%
2	Sumatera Utara	21%	19%	18%	20%	21%
3	Sumatera Barat	32%	30%	28%	31%	38%
4	Riau	18%	17%	16%	17%	15%

<sup>6</sup> Nadia Febrianty and Gerry Hamdani Putra, 'Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Pada 19 Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018-2021', *Jurnal Kendali Akuntansi*, 1.2 (2023), 30–46.

5	Jambi	31%	29%	27%	27%	31%
6	Sumatera Selatan	19%	17%	16%	16%	17%
7	Bengkulu	45%	44%	40%	41%	42%
8	Lampung	27%	25%	23%	25%	26%
9	DKI Jakarta	1%	0%	0%	0%	0%
10	Jawa Barat	9%	9%	8%	9%	12%
11	Jawa Tengah	15%	14%	13%	14%	14%
12	Daerah Istimewa Yogyakarta	24%	22%	21%	22%	22%
13	Jawa Timur	12%	12%	11%	11%	12%
14	Kalimantan Barat	30%	28%	24%	26%	27%
15	Kalimantan Tengah	32%	30%	28%	26%	27%
16	Kalimantan Selatan	18%	17%	17%	13%	12%
17	Kalimantan Timur	7%	8%	8%	5%	5%
18	Sulawesi Utara	37%	36%	34%	36%	39%
19	Sulawesi Tengah	40%	36%	32%	31%	34%
20	Sulawesi Selatan	27%	25%	23%	26%	27%
21	Sulawesi Tenggara	39%	36%	32%	32%	34%
22	Bali	20%	21%	20%	20%	18%
23	Nusa Tenggara Barat	31%	29%	28%	28%	28%
24	Nusa Tenggara Timur	35%	32%	33%	39%	41%
25	Maluku	55%	50%	50%	52%	51%
26	Papua	17%	18%	17%	21%	25%
27	Maluku Utara	51%	47%	42%	40%	54%
28	Banten	11%	10%	9%	10%	10%
29	Bangka Belitung	39%	39%	35%	33%	38%
30	Gorontalo	55%	51%	48%	51%	52%
31	Kepulauan Riau	30%	31%	29%	28%	27%
32	Papua Barat	13%	15%	18%	17%	21%
33	Sulawesi Barat	52%	48%	48%	51%	50%
34	Kalimantan Utara	46%	44%	41%	40%	36%
35	Papua Tengah					
36	Papua Pegunungan					
37	Papua Selatan					
38	Papua Tengah					

Sumber: *DJPK data diolah, 2024*

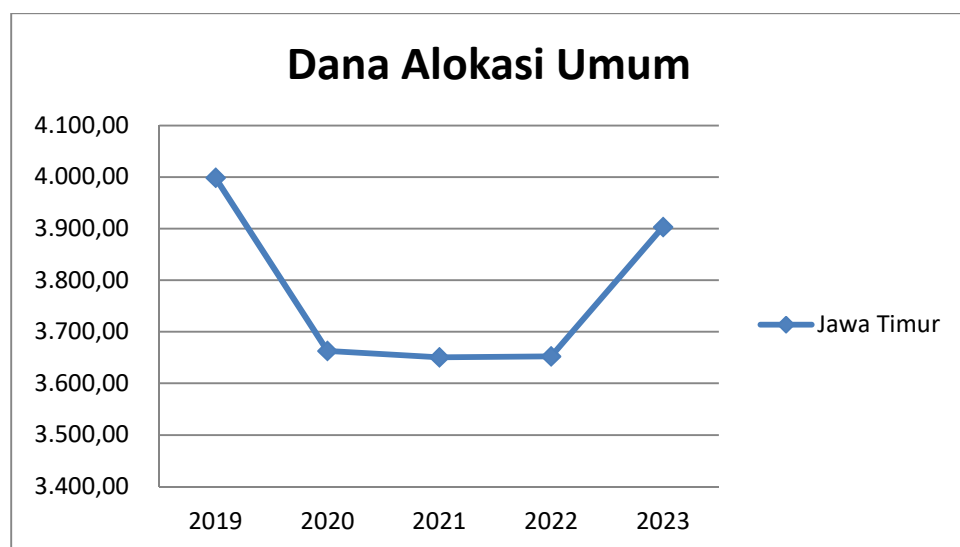
Pada tabel tingkat rasio dana alokasi umum Provinsi di Indonesia diatas menunjukkan Provinsi Jawa Timur mempunyai tingkat rasio DAU pada tahun 2019-2023 antara 0%-25% yang memperlihatkan tingkat



ketergantungan Provinsi Jawa Timur terhadap Pemerintah Pusat sangat rendah. Hal ini menunjukkan bahwa, Provinsi Jawa Timur mampu mengatur dan mengelola tingkat kesejahteraan masyarakat tanpa harus menunggu peran dari Pemerintah Pusat untuk mendapatkan bantuan dana.<sup>7</sup>

**Tabel 1.4**

**Dana Alokasi Umum Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2023**



Sumber: *BPS Provinsi Jawa Timur*

Pada tabel dana alokasi umum Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2023 memperlihatkan bahwa Provinsi Jawa Timur pada tahun 2019 sebesar 3.998,43 Milyar Rupiah, tahun 2020 sebesar 3.662,91 Milyar Rupiah, pada tahun 2021 sebesar 3.650,37 Milyar Rupiah, tahun 2022 sebesar 3.652,12 Milyar Rupiah, pada tahun 2023 sebesar 3.902,92 Milyar Rupiah. Dari Provinsi tersebut dana alokasi umum yang banyak terdapat pada Provinsi Jawa Timur pada tahun 2019. Semakin banyak

<sup>7</sup> Dkk Sri Indriyani, *Kinerja Keuangan Daerah Dan Kesejahteraan Masyarakat Di Kawasan Teluk Tomini*, ed. by Arief Dul, 1st edn (Yogyakarta: Bintang Semesta Media, 2023). Hal 10

dana yang diterima Pemerintah daerah, maka semakin besar pula ketergantungan daerah terhadap Pemerintah pusat.

Salah satu peran yang juga sangat penting dalam menghasilkan sumber pendapatan daerah yang bersumber dari potensi-potensi yang dimiliki setiap daerah. Belanja modal berperan dalam pelayanan publik dalam suatu daerah yang mampu memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan pendapatan daerah. Kegiatan yang dilakukan dalam belanja modal dapat dikatakan sebagai investasi pemerintah daerah dalam menata daerahnya sendiri. Akan tetapi, dalam kegiatan belanja modal tidak dapat dikatakan sebagai ajang untuk mencari profit. Ukuran keberhasilan pemerintah dalam mengelola belanja modal yaitu mutu yang diberikan sesuai dengan yang diharapkan, sesuatu yang diharapkan sesuai dengan yang dibutuhkan, kegiatan dalam belanja modal mengarah pada kepentingan daerah bukan untuk kepentingan pribadi, dan biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan belanja modal tidak melebihi anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Berkembangnya pembangunan yang memadai menjadikan daerah tersebut mampu mendorong kegiatan investasi di daerah tersebut, hal ini berdampak terhadap pertumbuhan pendapatan daerah pada waktu yang akan datang, perekonomian daerah semakin berkembang dan dapat menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat setempat.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Ni Putu Gina Sukma Antari and Ida Bagus Panji Sedana, 'Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah' (Udayana University, 2018).

**Tabel 1.5**  
**Tingkat Rasio Belanja Modal Provinsi Di Indonesia**

No	Nama Provinsi	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Nanggroe Aceh Darussalam	20%	13%	16%	18%	15%
2	Sumatera Utara	9%	12%	9%	14%	19%
3	Sumatera Barat	16%	11%	10%	15%	17%
4	Riau	13%	11%	11%	17%	20%
5	Jambi	18%	15%	10%	19%	21%
6	Sumatera Selatan	17%	17%	18%	16%	13%
7	Bengkulu	24%	15%	11%	14%	19%
8	Lampung	14%	11%	12%	15%	17%
9	DKI Jakarta	18%	6%	11%	14%	14%
10	Jawa Barat	7%	4%	5%	7%	6%
11	Jawa Tengah	8%	4%	6%	7%	7%
12	Daerah Istimewa Yogyakarta	19%	17%	12%	13%	13%
13	Jawa Timur	8%	6%	6%	8%	8%
14	Kalimantan Barat	15%	13%	15%	18%	21%
15	Kalimantan Tengah	26%	22%	19%	21%	26%
16	Kalimantan Selatan	21%	12%	15%	15%	26%
17	Kalimantan Timur	11%	11%	14%	16%	23%
18	Sulawesi Utara	22%	24%	24%	21%	13%
19	Sulawesi Tengah	20%	16%	12%	13%	17%
20	Sulawesi Selatan	10%	12%	14%	12%	10%
21	Sulawesi Tenggara	29%	25%	28%	33%	24%
22	Bali	9%	7%	13%	22%	14%
23	Nusa Tenggara Barat	13%	12%	14%	22%	10%
24	Nusa Tenggara Timur	15%	18%	16%	25%	14%
25	Maluku	18%	20%	20%	18%	17%
26	Papua	17%	7%	8%	18%	8%
27	Maluku Utara	25%	22%	27%	27%	24%
28	Banten	12%	10%	11%	15%	13%
29	Bangka Belitung	16%	17%	17%	15%	18%
30	Gorontalo	14%	11%	9%	16%	12%
31	Kepulauan Riau	17%	15%	9%	14%	14%
32	Papua Barat	19%	16%	30%	29%	12%
33	Sulawesi Barat	18%	17%	20%	26%	20%
34	Kalimantan Utara	23%	25%	16%	19%	20%
35	Papua Tengah					14%

36	Papua Pegunungan					44%
37	Papua Selatan					35%
38	Papua Tengah					29%

Sumber: *DJPK data diolah, 2024*

Pada tabel tingkat rasio belanja modal Provinsi di Indonesia menunjukkan bahwa Provinsi Jawa Timur dalam melaksanakan belanja modal belum dapat dikatakan ideal. Menurut Peraturan Presiden no. 54 tahun 2010, alokasi belanja modal di APBD minimal harus 29% dari total belanja daerah. Proporsi dalam melaksanakan belanja modal idealnya berkisar antara 25-30% dari total belanja daerah.<sup>9</sup> Hal ini menandakan bahwa Provinsi Jawa Timur belum dapat dikatakan ideal dalam melaksanakan belanja modal meskipun pendapatan daerah termasuk kategori sangat efektif.

Kinerja keuangan daerah merupakan kemampuan suatu daerah yang berguna untuk mengelola sumber keuangan yang ada dalam daerahnya sendiri untuk memenuhi kebutuhan daerah tersebut.<sup>10</sup> Kinerja keuangan Pemerintah dapat diukur dari seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam menggali potensi-potensi yang dimiliki daerahnya sehingga mampu memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan pendapatan daerah setiap tahunnya. Kinerja keuangan Pemerintah daerah pada penelitian ini diukur dengan menggunakan rasio pertumbuhan pendapatan daerah. Rasio pertumbuhan pendapatan daerah dapat

---

<sup>9</sup> Moh. Khusaini, *Keuangan Daerah*, ed. by Tim UB Press, 1st edn (Malang: Tim UB Press, 2018). Hal 172

<sup>10</sup> Rauhul Ijtihad dan Iwan Harsono, 'Pengaruh Rasio Kemandirian Daerah, Efektifitas Pendapatan Asli Daerah, Dan Pengelolaan Belanja Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah', *Ganec Swara*, 2024, 41.

menunjukkan seberapa besar kemampuan yang dimiliki pemerintah daerah untuk mempertahankan atau meningkatkan pertumbuhan pendapatannya dari satu periode ke periode berikutnya. Semakin tingginya pertumbuhan pendapatan daerah dan bernilai positif setiap tahunnya mengindikasikan bahwa pemerintah daerah telah mampu meningkatkan pertumbuhan pendapatan daerahnya.

Pertumbuhan pendapatan daerah mengalami kenaikan serta penurunan setiap tahunnya menyebabkan pemerintah daerah harus mampu menjawab segala kebutuhan daerah dan menunjukkan bahwa pemerintah daerah mampu mengelola perekonomian daerah dengan baik. Dalam hal ini dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang perlu dikaji lebih lanjut. Maka penulis ingin meneliti dengan judul **“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Periode 2019-2023.”**

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis mengidentifikasi beberapa permasalahan dalam penulisan ini, yang akan dijadikan bahan penelitian selanjutnya. Ada beberapa permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Pendapatan asli daerah menjadi salah satu faktor yang penting dalam pemasukan hasil daerah, karena dengan adanya pemasukan pada setiap daerah maka daerah tidak selalu bergantung pada

bantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat dan juga dapat menjadi hal positif untuk kemakmuran masyarakat.

2. Dana alokasi umum bergantung pada bantuan pusat hal ini menunjukkan kinerja belum optimal sehingga dalam mengembangkan daerahnya sendiri harus menunggu peran pemerintah.
3. Belanja modal dapat digunakan untuk mengembangkan pembangunan infrastruktur dan sarana dalam daerah yang mampu menjadi investasi dan juga sumber pendapatan bagi wilayah tersebut.
4. Dana pemerintah daerah perlu ditingkatkan dengan kinerja keuangan pemerintah yang optimal, karena hasil keuangan pemerintah merupakan indikator dari keberhasilan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan demi tercapainya kemakmuran masyarakat.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penulisan permasalahan, maka permasalahan yang muncul dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur pada tahun 2019 hingga 2023 ?

2. Apakah dana alokasi umum berpengaruh terhadap kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur pada tahun 2019 hingga 2023?
3. Apakah belanja modal berpengaruh terhadap kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur pada tahun 2019 hingga 2023?
4. Apakah pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan belanja modal berpengaruh terhadap kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur pada tahun 2019 hingga 2023?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, Tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk menguji pengaruh pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Timur tahun 2019-2023.
2. Untuk menguji pengaruh dana alokasi umum terhadap kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Timur tahun 2019-2023.
3. Untuk menguji pengaruh belanja modal terhadap kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Timur tahun 2019-2023.
4. Untuk menguji pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan belanja modal terhadap kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Timur tahun 2019-2023.

## **E. Kegunaan Penelitian**

Dengan adanya penelitian ini, harapannya terdapat beberapa manfaat yang diperoleh, antara lain:

### 1. Secara Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori khususnya pada kajian mata kuliah manajemen keuangan keuangan negara.

### 2. Secara Praktis

#### a. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai pendapatan primer daerah, alokasi umum dan pertumbuhan ekonomi, serta diharapkan dapat menjadi pedoman bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaannya, khususnya instansi pemerintah daerah. Selain itu dapat dijadikan tolak ukur dan masukan untuk meningkatkan kinerja serta mengoptimalkan fungsi dan peran informasi.

#### b. Bagi Akademisi

Diharapkan penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan keahlian untuk pengembangan keilmuan khususnya bidang mata kuliah manajemen keuangan sektor keuangan publik, serta penelitian selanjutnya.



c. Bagi Penelitian Berikutnya

Penelitian ini diharapkan mampu menjadikan pertimbangan dalam penelitian selanjutnya, agar solusi yang diperoleh lebih bervariasi.

## **F. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian**

### 1. Ruang lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian dalam hal ini, penulis membatasi masalah dalam penelitian ini dengan memfokuskan pada laporan keuangan Pemerintah Kab/Kota Provinsi Jawa Timur periode 2019-2023.

### 2. Keterbatasan Penelitian

Penelitian tersebut harus mempunyai batasan-batasan tertentu untuk memudahkan penelitian dan agar hasilnya akurat, karena penelitian tersebut tidak komprehensif. Ada masalah terbatas dengan penelitian ini. Kinerja keuangan suatu negara dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti pendapatan daerah, belanja daerah, pembiayaan daerah, serta situasi makroekonomi dan sumber daya manusia.

## **G. Penegasan Istilah**

Dalam metode penyusunan skripsi ini perlu ditegaskan kembali maksud dari istilah-istilah yang ditulis peneliti dari judul yang dipilih, agar dikemudian hari tidak terjadi kesimpangsiuran, salah paham atau

kesalahpahaman pada saat membaca dan memahami skripsi ini. Berikut adalah definisi konseptual dan definisi operasional untuk masing-masing variabel:

### 1. Definisi Konseptual

#### a) Pendapatan Asli Daerah

Menurut Halim (2004) Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan semua penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber- sumber dalam wilayahnya sendiri yang diperoleh berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>11</sup>

#### b) Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum adalah dana yang diberikan untuk mencapai pemerataan keuangan antar daerah dan

---

<sup>11</sup> Phaureula Artha Wulandari dan Emy Iryanie, *Pajak Daerah Dan Pendapatan Asli Daerah* (yogyakarta: DEEPUBLISH, 2012).

digunakan untuk membiayai pengeluaran yang dilakukan secara desentralisasi. Dalam UU No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah menerangkan bahwa dana alokasi umum mempunyai tujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antara daerah satu dengan yang lain hal ini bertujuan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan mengenai pertimbangan kebutuhan dan potensi setiap daerah.<sup>12</sup>

c) Belanja Modal

Belanja modal merupakan belanja pemerintah daerah yang mempunyai fungsi melebihi 1 tahun anggaran dan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya menambah belanja rutin seperti belanja pemeliharaan pada kelompok belanja sektor pemerintah (Halim, 2004).<sup>13</sup>

d) Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan daerah dapat diartikan sebagai tingkat pencapaian suatu hasil kerja serta pengelolaan bidang keuangan yang meliputi anggaran dan realisasi anggaran dengan menggunakan indikator keuangan yang

---

<sup>12</sup> Riva Ubar Harahap, 'Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dan Dana Bagi Hasil Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Pada Kab./Kota Propinsi Sumatera Utara', *KITABAH: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Syariah*, 1.1 (2017).

<sup>13</sup> Made Ari Juniawan dan Ni Putu Santi Suryantini, 'Pengaruh Pad, Dau Dan Dak Terhadap Belanja Modal Kota Dan Kabupaten Di Provinsi Bali' (Udayana University, 2018).

telah ditetapkan oleh kebijakan dan perundang undangan yang diukur selama periode anggaran.

## 2. Definisi Operasional

Definisi operasional dalam hal ini, penulis memfokuskan pada kinerja keuangan dengan menggunakan analisis berupa rasio kinerja keuangan Pemerintah Kab/Kota Provinsi. Adapun rasio tersebut berupa: (1) Rasio efektivitas PAD, (2) rasio pendapatan asli daerah, (3) rasio dana alokasi umum, (4) rasio belanja modal.

## **H. Sistematika Penulisan**

### BAB I Pendahuluan

Bab ini menjelaskan latar belakang identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, ruang lingkup dan definisi kerja.

### BAB II Kajian Pustaka

Bab ini berisi tentang teori-teori yang diperlukan untuk menjelaskan variable yang akan diteliti. Pada bab ini juga berisi pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, pertumbuhan ekonomi, kinerja keuangan Pemerintah. Kemudian mencakup penelitian yang relevan, kerangka konseptual, dan kerangka hipotetis.

### BAB III Metode Penelitian

Bab ini menjelaskan tentang populasi, sampel, teknik pengambilan sampel, teknik pengumpulan data, skala pengukuran, variabel penelitian, dan sumber data.

### BAB IV Hasil dan Pembahasan

Bab ini memberikan deskripsi data dan temuan penelitian.

### BAB V Pembahasan

Bab ini membahas analisis dan perhitungan hasil temuan melalui teori, penelitian terdahulu dan teori yang ada. Pembahasan dalam bab ini merupakan analisis hasil temuan di lapangan yang kemudian dipadukan dengan teori-teori yang ada.

### BAB VI Penutup

Bab ini berisi kesimpulan dan saran berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan.

Bagian akhir dari laporan ini berisikan sumber daftar pustaka, lampiran-lampiran yang berhubungan.